

PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK

PERATURAN BUPATI WONOSOBO NOMOR 27 TAHUN 2020/LD NOMOR 27 TAHUN 2020

TENTANG PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK

ABSTRAK:

- Bahwa peningkatan jumlah penduduk dan pembangunan mengakibatkan peningkatan jumlah air limbah domestik sehingga perlu dikelola secara sinergi, berkelanjutan dan profesional, yang mana pengendalian pembuangan air limbah domestik untuk melindungi kualitas air tanah dan air permukaan serta meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Pemerintah Daerah berwenang melakukan pengelolaan pengembangan sistem air limbah domestik, sehingga perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Air limbah Domestik.
- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah: Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018; Peraturan Presiden Nomor 185 Tahun 2014; Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.68 / Menlhk / Setjend/ Kum.1 / 8 / 2016 Tahun 2016; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 04/PRT/M/2017 Tahun 2017; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29 /PRT /M/2018 Tahun 2018; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2012.
- Peraturan Bupati ini mengatur maksud, tujuan, ruang lingkup dan sasaran, sistem pengolahan air limbah domestik, pengoperasian, pemeliharaan, dan rehabilitasi, pemanfaatan, kelembagaan, program LLTT dan LLTTT, hak, kewajiban dan larangan, peran serta masyarakat, kerja sama, sosialisasi, advokasi, kampanye, edukasi, dan promosi, perizinan, pembinaan, pengawasan, serta sanksi administratif.

CATATAN:

- Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 26 Juni 2020.

